

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAMBI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

I.I. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana di amanatkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah di ubah dengan Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi menyusun Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.

Laporan keuangan yang disusun ini meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana yang di atur dalam peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah serta permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah Daerah. Laporan keuangan merupakan asersi atau pernyataan dari pihak manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi yang menginformasikan kepada pihak terkait yaitu para pengguna kepentingan (stake holder) yang ada tentang kondisi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.

Laporan keuangan ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi selama satu periode pelaporan. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan, dimana laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi terdiri dari :

1). Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

2). Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi mengenai Aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu .

3). Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan – LO, beban dan surplus/defisit operasional.

4). Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

5). Catatan atas Laporan Keuangan

Merupakan penjelasan terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas, termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian

informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan serta kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

1.2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun anggaran 2020 diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang mengatur keuangan daerah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana setelah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang pokok-

- pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi;
 15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.
 16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 17. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan Gubernur Jambi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020;

1.3. Sistematika Penulisan Atas Laporan Keuangan

Unsur Laporan Keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Atas Laporan Keuangan

BAB II Informasi Tentang Organisasi dan Pencapaian Target Kinerja

- 2.1. Informasi Tentang Organisasi
- 2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan/Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengeluaran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V. Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Neraca

BAB VI. Penutup

Lampiran Buku Inventaris Tahun 2020

BAB II

INFORMASI TENTANG ORGANISASI DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Informasi Tentang Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi berdiri pada bulan Agustus 2014 berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.

Tugas Pokok dan Fungsi :

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah dan Pelayanan Umum di bidang Komunikasi dan Informatika;
- c. Pelaksanaan pembinaan di bidang komunikasi dan informatika
- d. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Subbagian Keuangan dan Aset
 3. Subbagian Program dan Pelaporan

- c. Bidang Layanan e-Government terdiri dari
 - 1. Seksi Pengembangan Aplikasi
 - 2. Seksi Pengembangan e-government
 - 3. Seksi Tata Kelola e-government
- d. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan dan Dokumentasi Informasi
 - 2. Seksi Publikasi
 - 3. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik
- e. Bidang Persandian dan Teknologi Informasi Komunikasi terdiri dari :
 - 1. Seksi Tata Kelola dan Operasional Persandian
 - 2. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian
 - 3. Seksi Teknologi, Informasi dan Komunikasi
- f. Bidang Statistik terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengolahan Data Statistik
 - 2. Seksi Pelayanan Data dan Publikasi
 - 3. Seksi Layanan Pengadaan secara Elektronik
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan program suatu program perlu ditetapkan indikator target kinerja (performance) Untuk Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi telah menunjukkan kemajuan dalam rangka dan atau menuju pada menunjukkan kemajuan dalam rangka dan atau menuju pada sasaran yang telah ditetapkan, yakni indikator kinerja input, output dan outcome antara yang direncanakan dengan realisasinya atau rencana kinerja yang dicapai Dinas Komunikasi

dan Informatika Provinsi Jambi. Pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi tahun 2020 menyajikan informasi sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja (Program)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	fisik %
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.207.382.133	3.168473308	9879	99,61
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	408.142.500	385.474.830	94,45	100
3	Program peningkatan Disiplin Aparatur	30.450.000	30.450.000	100	100
4	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	13.000.000	12.900.000	99,23	100
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	111.976.000	110.616.950	98,99	100
6	Program Pembangunan dan Pengembangan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	582.111.865	579.137.865	99,47	100
7	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1.062.702.650	1.019.452.698	95,93	98,07
8	Program Pembangunan, pengembangan Aplikasi dan Telematika	538.045.250	532.084.250	98,89	100
9	Program Persandian untuk Pengamanan Informasi	125.559.630	120.237.630	98,76	99,60
10	Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah	50.713.350	37.073.850	73,10	81,46
Jumlah		6.156.295.778	6.018.753.381	97,77	99,30

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Belanja Operasional dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 12.688.366.369,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	8.363.460.460,83-	7.808.789.988,-	93,37
2.	Belanja Barang dan Jasa	4.504.539.278,-	4.417.805.881,-	98,07
3.	Belanja Modal	463.820.500,-	461.770.500,-	99,56
Jumlah		13.331.820.238,83,-	12.688.366.369,-	95,17

3.1.2. Belanja Modal

Untuk Belanja modal tahun 2020 pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp.461.770.500,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realiasi (Rp)	%
1.	BM. Tanah	-	-	-
2.	BM. Peralatan dan Mesin	432.620.500,-	430.670.500,-	99,55
3.	BM. Gedung dan Bangunan	-	-	-
4.	BM. Jalan,Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5.	BM. Aset lainnya	31.200.000,-	31.100.000,-	99,68
6.	BM. Konstruksi dalam pengerjaan	-	-	-
7.	BM. Akumulasi Penyusutan	-	-	-
Jumlah		463.820.500,-	461.770.500,-	99,56

3.2. Hambatan/Kendala dalam pencapaian Target kinerja Keuangan

Hambatan/Kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Untuk belanja tidak langsung terealisasi 92,95 % sesuai dengan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.
2. Untuk Belanja langsung penyerapan anggaran sebesar Rp.6.018.753.381,- atau 97,77 % dari target 100% atau Anggaran sebesar Rp. 6.156.295.778,- ini menandakan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dalam mencapai target Keuangan belum menemukan kendala yang berarti sehingga untuk program dan kegiatan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas Pelaporan dalam laporan Keuangan ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas perda nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 adalah berbasis akrual, dimana pengakuan pendapatan, beban, asset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Dalam pengakuan dan pengukuran juga mencakup kebijakan mengenai harga perolehan dan kapitalisasi aset, kebijakan harga perolehan merupakan pengakuan terhadap jumlah kas setara kas yang dibayar terdiri dari belanja modal, belanja administrasi/pembangunan, belanja pengiriman, pajak, dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga perolehan aset tetap.

4.4. Penerapan kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan dalam standar akuntansi Pemerintah.

Pemerintah Provinsi Jambi menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada Pemerintah Daerah, Kebijakan yang diterapkan dalam penyusunan laporan Keuangan ini adalah Peraturan Gubernur Jambi nomor 56 Tahun 2015 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

- a. Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD (BAKEUDA) untuk digabung menjadi laporan Keuangan Pemerintah Daerah konsolidasian.
- b. Aset lancar kas dan setara kas diakui sebesar nilai pasar pada saat tanggal pelaporan
- c. Piutang Daerah diakui sebesar nilai bersih yang biasa direalisasikan (net realizable value) Persediaan diakui sebesar nilai historisnya, dalam hal ini kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pencatatan persediaan adalah dengan menggunakan metode fisik, yakni menghitung saldo persediaan pada akhir periode akuntansi, harga yang digunakan untuk menghitung persediaan akhir periode adalah harga pembelian terakhir persediaan (FIFO).
- d. Investasi aset keuangan diakui sebesar nilai pasar (current market value)
- e. Aset tetap diakui sebesar nilai historisnya.
- f. Seluruh aset tetap untuk penyajian neraca per 31 Desember 2020 dilakukan penyusutan.
- g. Aset tak berwujud diamortisasi sama halnya dengan Aset tetap
- h. Kewajiban diakui sebesar nilai pasar.
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi menggunakan basis akrual untuk pencatatan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam rangka menghasilkan neraca.
- i. Penilaian aset tetap yang tidak terdapat data tentang nilai historisnya ditetapkan sebesar nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.
- j. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporannya itu tanggal 31 Desember 2020.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan gambaran informasi mengenai realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit dan Pembiayaan komparatif dengan anggarannya dalam Tahun Anggaran 2020.

Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020.

Laporan Operasional menyajikan Pendapatan sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, dan Beban tahun berjalan (PSAP 12 paragraf 8).

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Belanja Operasional

Realisasi Belanja Operasional sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp.12.688.366.369,- seperti dibawah ini :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	8.363.460.460,83,-	7.808.789.988,-	93,37
2.	Belanja Barang dan Jasa	4.504.539.278,-	4.417.805.881,-	98,07
3.	Belanja Modal	463.820.500,-	461.770.500,-	99,56
Jumlah		13.331.820.238,83,-	12.688.366.369,-	95,17,-

Belanja Pegawai :

- Gaji dan tunjangan Rp.4.188.993.974,80,-
- Tambahan penghasilan PNS (TKD) Rp.2.986.530.486,03,-
- Jumlah Rp.7.175.524.460,83,-

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
Gaji dan Tunjangan	4.188.993.974,80,-	3.763.525.173,-	89,84
Gaji pokok PNS/Uang Representasi	2.936.479.651,11,-	2.676.950.300,-	91,16
Tunjangan Keluarga	287.140.909,34,-	266.796.704,-	92,91
Tunjangan Jabatan	251.546.805,50,-	242.590.000,-	96,44
Tunjangan Fungsional	61.929.452,80,-	46.768.900,-	75,52
Tunjangan Fungsional Umum	87.172.016,74,-	71.610.000,-	82,15
Tunjangan Beras	188.142.080,-	134.194.260,-	71,33
Tunjangan PPh/Tunjangan khusus	6.136.422,40,-	5.090.204,-	82,95
Pembulatan Gaji	61.952,-	34.284,-	55,34
Iuran Asuransi Kesehatan	254.752.804,31,-	218.670.332,-	85,84
Tunjangan Perumahan	0	0	0,0
Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	8.098.713,60,-	5.482.232,-	67,69
Belanja Jaminan Kematian	28.584.712,60,-	16.446.857,-	57,54
Belanja Tunjangan Pengamanan Persandian	78.948.454,40,-	78.891.100,-	99,93
Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	2.986.530.486,03,-	2.906.087.815,-	97,31
Jumlah	7.175.524.460,83,-	6.669.612.988,-	92,95

Belanja Pegawai : Rp. 1.187.936.000 (Belanja Langsung)

Rincian Realisasi Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan	170.052.000	149.915.000	88,16
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	89.142.000	71.705.000	80,44
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.200.000	7.200.000	100,00
- Honorarium Tim Pelaksana	8.910.000	8.910.000	100,00
- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	64.800.000	62.100.000	95,83
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan	22.404.000	21.696.000	96,84
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.204.000	5.496.000	88,59
- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	16.200.000	16.200.000	100,00
Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi	176.532.000	174.496.000	98,85
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.532.000	9.496.000	82,34
- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	165.000.000	165.000.000	100,00
Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi	24.732.000	20.784.000	84,04
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.532.000	4.584.000	53,73
- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	16.200.000	16.200.000	100,00
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Informasi Publik	57.132.000	54.096.000	94,69
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.532.000	5.496.000	64,42
- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	48.600.000	48.600.000	100,00
Kegiatan Pelayanan Teknis Komisi Informasi Provinsi Jambi	486.768.000	486.768.000	100,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.368.000	10.368.000	100,00
- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	476.400.000	476.400.000	100,00
Kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik Provinsi Jambi	57.900.000	55.164.000	95,27
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.300.000	6.564.000	70,58
- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	48.600.000	48.600.000	100,00
Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Kemasyarakatan,Media dan Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik Provinsi Jambi	51.264.000	50.380.000	98,28
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.664.000	1.780.000	66,82
- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	48.600.000	48.600.000	100,00
Kegiatan Pembangunan,Pengembangan dan Pemeliharaan Website	6.780.000	6.396.000	94,34
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.780.000	6.396.000	94,34
Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dibidang TIK Kegiatan	5.496.000	1.832.000	33,33
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.496.000	1.832.000	33,33
Kegiatan Pemberdayaan TIK	21.696.000	20.472.000	94,36

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.496.000	4.272.000	77,73
- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	16.200.000	16.200.000	100,00
Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Persandian untuk Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah	23.988.000	22.252.000	92,76
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.788.000	6.052.000	77,71
- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	16.200.000	16.200.000	100,00
Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keamanan Informasi	51.488.000	48.402.000	94,01
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.788.000	6.052.000	77,71
- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	43.700.000	42.350.000	96,91
Kegiatan Diseminasi Layanan dan Publikasi Data Statistik Sektoral	22.404.000	20.472.000	91,38
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.204.000	4.272.000	68,86
- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	16.200.000	16.200.000	100,00
Kegiatan Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Statistik Sektoral	9.300.000	6.052.000	65,08
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.300.000	6.052.000	65,08
Jumlah	1.187.936.000	1.139.177.000	95,90

Belanja Barang dan Jasa : Rp 4.504.539.278

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.026.330.133	3.007.558.308	95,93
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.698.000	1.698.000	100
- Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya	1.698.000	1.698.000	100
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik	2.549.100.000	2.535.012.180	99,45
Belanja Jasa Kantor	23.100.000	19.812.180	85,77
- Belanja Telpon	5.100.000	5.100.000	100,00
- Belanja Air	18.000.000	14.712.180	81,73
Belanja Sewa Perlengkapan dan peralatan Kantor	2.526.000.000	2.515.200.000	99,57
- Belanja Sewa Bandwitdh	1.826.000.000	1.815.600.000	99,43
- Belanja Sewa Back Up Bandwitdh	700.000.000	699.600.000	99,94
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	21.745.800	21.745.800	100,00
-Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	21.745.800	21.745.800	100,00
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	56.050.900	54.873.895	97,90

- Belanja Alat Tulis Kantor	56.050.900	54.873.895	97,90
Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.497.000	15.347.500	82,97
- Belanja Cetak	15.997.000	12.905.000	80,67
- Belanja Penggandaan	2.500.000	2.442.500	97,70
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	45.000.000	44.900.000	99,78
- Belanja Publikasi	21.500.000	21.500.000	100,00
- Belanja Surat Kabar/Majalah	23.500.000	23.400.000	99,57
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	27.000.000	26.918.400	99,70
- Belanja Makanan dan minuman rapat	15.000.000	14.945.000	99,63
- Belanja Makanan dan minuman tamu	12.000.000	11.973.400	99,78
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	307.238.433	307.062.533	99,94
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	170.518.100	170.362.650	99,91
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	136.720.333	136.699.883	99,99
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	408.142.500	385.474.830	94,45
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	177.400.000	156.499.830	88,22
Belanja bahan pakai habis	116.400.000	99.088.400	85,13
- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	116.400.000	99.088.400	85,13
Belanja Perawatan kendaraan bermotor	61.000.000	57.411.430	94,12
- Belanja Jasa Servis	44.000.000	43.993.430	99,99
- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	17.000.000	13.418.000	78,93
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	230.742.500	228.975.000	99,23
- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	230.742.500	228.975.000	99,23
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	30.450.000	30.450.000	100,00
Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	30.450.000	30.450.000	100,00
- Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	30.450.000	30.450.000	100,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	13.000.000	12.900.000	99,23
kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	13.000.000	12.900.000	99,23
- Belanja Kursus ,pelatihan,sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	13.000.000	12.900.000	99,23
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN			
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	89.572.400	88.920.950	99,27
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan	89.572.400	88.920.950	99,27
Belanja bahan pakai habis	4.876.500	4.876.500	100,00
- Belanja Alat Tulis Kantor	4.876.500	4.876.500	100,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	17.900.000	17.380.000	97,09
- Belanja Cetak	13.900.000	13.400.000	96,40
- Belanja Penggandaan	4.000.000	3.980.000	99,50

Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000	7.949.000	99,36
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000	7.949.000	99,36
Belanja Perjalanan Dinas	58.795.900	58.715.450	99,86
- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah	33.870.000	33.789.550	99,76
- Belanja Perjalanan dinas luar daerah	24.925.900	24.925.900	100,00
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	114.433.365	113.583.365	99,26
Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi	114.433.365	113.583.365	99,26
Belanja Jasa Kantor	60.000.000	59.500.000	99,17
- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	60.000.000	59.500.000	99,17
Belanja Perjalanan Dinas	42.433.365	42.083.365	99,18
- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah	25.448.565	25.098.565	98,62
- Belanja Perjalanan dinas luar daerah	16.984.800	16.984.800	100,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000	12.000.000	100,00
- Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000	12.000.000	100,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	287.794.650	256.898.698	89,26
Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi	129.170.000	128.066.000	99,15
Belanja bahan pakai habis	81.700.000	81.190.000	99,38
- Belanja Dekorasi	10.000.000	9.490.000	94,90
- Belanja Publikasi	71.700.000	71.700.000	100,00
Belanja Jasa Kantor	30.000.000	30.000.000	100,00
- Belanja Jasa Event Organizer	30.000.000	30.000.000	100,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	0	0,00
- Belanja Cetak	500.000	0	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	16.970.000	16.876.000	99,45
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.970.000	16.876.000	99,45
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Informasi Publik	600.000	0	0,00
Belanja bahan pakai habis	600.000	0	0,00
- Belanja Dokumentasi	600.000	0	0,00
Kegiatan Teknis Komisi Informasi Provinsi Jambi	114.534.250	95.042.298	82,98
Belanja bahan pakai habis	15.191.250	13.748.950	90,51
- Belanja Alat Tulis Kantor	6.051.250	5.752.450	95,06
- Belanja Perangko,Materai dan benda pos lainnya	2.430.000	1.586.500	65,29
- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.710.000	4.710.000	100,00
- Belanja Publikasi	2.000.000	1.700.000	85,00
Belanja Jasa Kantor	30.600.000	22.796.481	74,50
- Belanja Telepon	6.000.000	1.108.912	18,48
- Belanja Air	3.600.000	1.848.400	51,34
- Belanja Listrik	12.000.000	11.500.000	95,83
- Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000	2.970.000	99,00

- Belanja Kawat/Faksimal/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000	5.369.169	89,49
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.500.000	7.001.300	73,70
- Belanja Jasa Servis	6.000.000	5.950.000	99,17
- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.500.000	1.051.300	30,04
Belanja Cetak dan Penggandaan	4.214.000	3.725.500	88,41
- Belanja Cetak	2.214.000	1.725.500	77,94
- Belanja Penggandaan	2.000.000	2.000.000	100,00
Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000	7.695.000	85,50
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000	7.695.000	85,50
Belanja Perjalanan Dinas	36.379.000	36.125.067	99,30
- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah	12.891.000	12.637.067	98,03
- Belanja Perjalanan dinas luar daerah	23.488.000	23.488.000	100,00
Belanja Pemeliharaan	4.500.000	3.950.000	87,78
- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.500.000	3.950.000	87,78
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.450.000	0	0,00
- Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.450.000	0	0,00
Belanja Perlengkapan/ Peralatan Kantor	700.000	0	0,00
- Belanja Perlengkapan /peralatan Kantor	700.000	0	0,00
Kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik	32.040.900	25.840.900	80,65
Belanja bahan pakai habis	15.000.000	15.000.000	100,00
- Belanja Dokumentasi	15.000.000	15.000.000	100,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	9.500.000	3.300.000	34,74
- Belanja Cetak	8.000.000	2.500.000	31,25
- Belanja Penggandaan	1.500.000	800.000	53,33
Belanja Perjalanan Dinas	7.540.900	7.540.900	100,00
- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah	7.540.900	7.540.900	100,00
Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Kemasyarakatan,Media dan Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik Provinsi Jambi	11.449.500	7.949.500	69,43
Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000	0	0,00
-Belanja Penggandaan	3.500.000	0	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	7.949.500	7.949.500	100,00
- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah	7.949.500	7.949.500	100,00
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN TELEMATIKA	439.623.250	439.034.250	99,87
Kegiatan Pembangunan ,Pengembangan dan Pemeliharaan Website	432.123.250	431.534.250	99,86
Belanja Perjalanan Dinas	34.073.250	34.073.250	100,00
- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000	30.000.000	100,00
- Belanja Perjalanan dinas luar daerah	4.073.250	4.073.250	100,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	398.050.000	397.461.000	99,85
- Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	398.050.000	397.461.000	99,85
Kegiatan Pemberdayaan TIK	7.500.000	7.500.000	100,00
Belanja bahan pakai habis	5.000.000	5.000.000	100,00

- Belanja Cinderamata/Souvenir,Vandle,piala dan penghargaan lainnya	5.000.000	5.000.000	100,00
Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000	2.500.000	100,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000	2.500.000	100,00
PROGRAM PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	50.083.630	49.583.630	99,00
Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Persandian untuk Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah	40.350.705	39.850.705	98,76
Belanja bahan pakai habis	17.580.384	17.080.384	97,16
- Belanja Alat Tulis Kantor	17.080.384	17.080.384	100,00
- Belanja Dekorasi	500.000	0	0,00
Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000	2.500.000	100,00
- Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.500.000	2.500.000	100,00
Belanja Perjalanan Dinas	20.270.321	20.270.321	100,00
- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah	14.912.800	14.912.800	100,00
- Belanja Perjalanan dinas luar daerah	5.357.521	5.357.521	100,00
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keamanan dan Informasi	9.732.925	9.732.925	100,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000	750.000	100,00
-Belanja Cetak	750.000	750.000	100,00
Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000	3.000.000	100,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	3.000.000	100,00
Belanja Perjalanan Dinas	5.982.925	5.982.925	100,00
- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah	5.982.925	5.982.925	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK DAERAH	45.109.350	33.401.850	74,05
Kegiatan Diseminasi Layanan dan Publikasi data statistik sektoral	28.309.350	16.601.850	58,64
Belanja bahan pakai habis	4.015.100	2.710.100	67,50
- Belanja Alat Tulis Kantor	3.015.100	2.710.100	89,88
- Belanja Dokumentasi	1.000.000	0	0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	11.500.000	2.847.500	24,76
- Belanja Cetak	8.400.000	0	0,00
- Belanja Penggandaan	3.100.000	2.847.500	91,85
Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000	1.250.000	41,67
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	1.250.000	41,67
Belanja Perjalanan Dinas	9.794.250	9.794.250	100,00
- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah	9.794.250	9.794.250	100,00
Kegiatan Pengumpulan, pengolahan dan analisis data statistik sektoral	16.800.000	16.800.000	100,00
Belanja bahan pakai habis	1.000.000	1.000.000	100,00
- Belanja Dokumentasi	1.000.000	1.000.000	100,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000	1.000.000	100,00
- Belanja Penggandaan	1.000.000	1.000.000	100,00

Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000	1.500.000	100,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000	1.500.000	100,00
Belanja Perjalanan Dinas	13.300.000	13.300.000	100,00
- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah	13.300.000	13.300.000	100,00
Jumlah	4.504.539.278	4.417.805.881	98,07

Belanja Modal (Belanja Peralatan dan Mesin) : Rp 432.620.500,-

Rincian Realisasi Belanja Modal (Belanja peralatan dan mesin)

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	11.000.000	11.000.000	100,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	11.000.000	11.000.000	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Komputer	11.000.000	11.000.000	100,00
- Belanja Pengadaan Personal Komputer	8.000.000	8.000.000	100,00
- Belanja Pengadaan Lemari	3.000.000	3.000.000	100,00
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA TEKNOLOGI INFOMASI DAN KOMUNIKASI	291.258.500	291.058.500	99,93
Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi	291.258.500	291.058.500	99,93
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-pengadaan komputer	291.258.500	291.058.500	99,93
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer	48.400.000	48.200.000	99,59
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Penagdaan Peralatan Jaringan	195.358.500	195.358.500	100,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Peralatan Studio Visual	47.500.000	47.500.000	100,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	97.112.000	95.362.000	98,20
Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelengaraaan Pemerintah Daerah Provnsi Jambi	60.600.000	58.850.000	97,11
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-pengadaan komputer	60.600.000	58.850.000	97,11
- Belanja Modal Pengadaan Komputer	26.000.000	26.000.000	100,00
- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	34.600.000	32.850.000	94,94
Kegiatan Pelayanan Teknis Komisi Informasi Provinsi Jambi	26.512.000	26.512.000	100,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan alat kantor lainnya	26.512.000	26.512.000	100,00
Kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik Provinsi Jambi	10.000.000	10.000.000	100,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000	10.000.000	100,00
PROGRAM PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN APLIKASI	33.250.000	33.250.000	100,00

TELEMATIKA			
Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Website	33.250.000	33.250.000	100,00
-Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	33.250.000	33.250.000	100,00
Jumlah	432.620.500	430.670.500	99,55

Belanja Modal (Belanja Aset lainnya) Rp.31.200.000,-

Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
PROGRAM PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN APLIKASI TELEMATIKA	31.200.000	31.100.000	99,68
Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Website	31.200.000	31.100.000	99,68
-Belanja Modal Aset Lainnya - Aplikasi dan Software	31.200.000	31.100.000	99,68
Jumlah	31.200.000	31.100.000	99,68

5.2. NERACA

A. ASET LANCAR

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Saldo Kas di Bendahara penerima per 31 Desember 2020	NIHIL	
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Saldo kas di Bendahara per 31 Desember 2020	NIHIL	
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Kas di BLUD	0,00	0,00
Saldo kas di BLUD per 31 Desember 2020	NIHIL	
	<u>2020</u>	<u>2019</u>

Kas lainnya	0,00	0,00
-------------	------	------

Saldo kas lainnya per 31 Desember 2020 NIHIL

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Setara Kas	0,00	0,00
Saldo Setara kas per 31 Desember 2020 NIHIL		

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Investasi jangka pendek	0,00	0,00

Saldo investasi jangka pendek per 31 Desember 2020 NIHIL

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Piutang pendapatan	0,00	0,00
Saldo Piutang pendapatan per 31 Desember 2020 NIHIL		

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Piutang lainnya	0,00	0,00
Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2020 NIHIL		

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2020 NIHIL		

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 NIHIL		

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Persediaan	374.820,-	1.297.900,-
Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 Rp. 374.820,-		

B. ASET TETAP

Aset Tetap	<u>2020</u>	<u>2019</u>
------------	--------------------	--------------------

21.898.075.128,- 21.555.208.042,-

Berdasarkan table Neraca Saldo Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp.**21.898.075.128,-** ditambah Aset Tidak Terwujud dan Aset lain-lain sebesar Rp. **2.585.490.490,-** sehingga Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 Menjadi Rp.**24.483.565.618,-** seperti table berikut :

URAIAN	TAHUN 2019	HIBAH	MUTASI TAHUN 2020	PENYESUAIA N HASIL INVENTARISA SI	TAHUN 2020
1. Tanah	-	-	-	-	-
2. Peralatan dan mesin	20.514.627.677	17.458.100	381.470.500	(273.861.514)	20.639.694.763
3. Gedung dan bangunan	404.926.000	-	-	-	404.926.000
4. Jalan, irigasi & jaringan	635.654.365	-	18.000.000	199.800.000	853.454.365
5. Aset Tetap Lainnya					
- TPTGR	-	-	-	-	-
- Software	1.174.820.000	-	31.100.000	-	1.205.920.000
- Rusak Berat	1.305.508.976	-	-	74.061.514	1.379.570.490
6. Konstruksi dalam pengerjaan	-	-	-	-	-
7.- Akumulasi Penyusutan	16.262.723.297,96 1.138.318.000	- -	- -	- -	17.399.653.864,97
- Akumulasi Amortisasi					1.175.856.666,67
JUMLAH	6.634.495.720,04	17.458.100	430.570.500	(273.861.514)	5.908.055.086,36

Mutasi Aset Tetap tahun 2020 sebagai berikut :

Saldo Aset Tetap Sebesar Rp.7.009.850.239,03,-meliputi:

- Saldo tahun 2019 Rp.24.035.537.018,-
- Mutasi penambahan per 31 Desember 2020 Rp. 430.570.500,-
- Penyesuaian hasil inventaris Rp. (74.061.514,-)
- Mutasi penambahan (hibah) Rp. 17.458.100,-
- Mutasi pengurangan (lelang) Rp. -

Akumulasi penyusutan tahun 2020	(Rp.17.399.653.864,97,-)
Jumlah	Rp. 7.009.850.239,03,-

C. ASET LAINNYA

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-
Aset Tidak berwujud	1.205.920.000,-	1.174.820.000,-
Aset Lain-lain	1.379.570.490,-	1.305.508.976,-
Akumulasi Amortisasi	(1.175.856.666,67,-)	(1.138.318.000,-)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.379.570.490,-)	(41.942.736,-)
JUMLAH ASET LAINNYA	30.063.333,33,-	1.300.068.240,-

D. KEWAJIBAN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	0,00	0,00,-
Utang belanja jasa kantor	0,00	0,00,-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00,-

E. EKUITAS

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ekuitas	4.528.859.416,36,-	6.593.850.884,04
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.528.859.416,36,-	6.593.850.884,04

BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan merupakan media bagi Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD. Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disertai dengan pernyataan tanggung jawab.

Sebagai akhir kata, kami segenap Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi mengharapkan agar Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 ini dapat memenuhi kewajiban Akuntabilitas kami kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dalam peningkatan kinerja.

KEPALA DINAS
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Ir. NURACHMAT HERLAMBANG, MMA
Pembina Utama Muda
NIP. 19680904 199503 1 001

LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAMBI



TAHUN ANGGARAN 2020

